

**PERAN KOMITE MADRASAH DALAM MANAJEMEN SARANA
DAN PRASARANA DI PESANTREN TAHFIDZ
QUR'AN DEWAN DA'WAH LAMPUNG**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
dalam Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Oleh

**DADANG SAPUTRA
NPM : 1511030136**

Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam



**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

**PERAN KOMITE MADRASAH DALAM MANAJEMEN
SARANA DAN PRASARANA DI PESANTREN
TAHFIDZ QUR'AN DEWAN
DA'WAH LAMPUNG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
dalam Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Oleh :

DADANG SAPUTRA
NPM : 1511030136

Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam

Pembimbing I : Dr.Hj. Eti Hadiati, M.Pd

Pembimbing II : Dr.H. Amirudin, M.Pd.I

**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020**

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan mendeskripsikan pelaksanaan peran komite madrasah dalam manajemen sarana dan prasarana di pesantren tahfidz qur'an lampung. Aspek yang diteliti meliputi peran komite madrasah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*), pendukung (*supporting agency*), pengontrol (*controlling agency*), dan sebagai mediator.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan subjek penelitian komite madrasah. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data menggunakan uji kredibilitas dengan triangulasi teknik dan sumber.

Hasil penelitian ini sebagai berikut, (1) peran komite madrasah sebagai badan pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam manajemen sarana dan prasarana madrasah yaitu komite madrasah berperan dalam memberi usul dan masukan mulai dari penyusunan RKAS, cara pengadaan sarana dan prasarana sampai pada cara yang digunakan dalam penghapusan sarana dan prasarana. (2) peran komite madrasah sebagai badan pemberi dukungan (*supporting agency*) dalam manajemen sarana dan prasarana pesantren ikut terlibat langsung dalam kepanitiaan pengadaan sarana dan prasarana pesantren, melakukan penggalangan dana dari orang tua wali santri untuk mencukupi kebutuhan anggaran pengadaan sarana dan prasarana pesantren, hinggannya memilih darang dan sarana yang sudah tidak layak pakai untuk dilakukan penghapusan. (3) peran komite madrasah sebagai badan pengontrol (*controlling agency*) dalam manajemen sarana dan prasarana pesantren terwujud dalam keikutsertaan komite madrasah dalam rapat penyusunan RKAS, melakukan pengecekan secara langsung kondisi sarana dan prasarana yang ada di madrasah dan selalu hadir terlibat langsung dalam proses penghapusan sarana dan prasarana. (4) peran komite madrasah sebagai mediator dalam manajemen sarana dan prasarana madrasah yaitu komite madrasah menjadi penyalur aspirasi dan ide dari masyarakat saat rapat penyusunan perencanaan pengadaan sarana dan prasarana, menjadi penyalur dana yang dikumpulkan dari orang tua wali santri untuk pesantren dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana madrasah terkini kepada orang tua wali santri dan masyarakat.

Kata kunci: Komite Madrasah dan Manajemen Sarana dan Prasarana

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dadang Saputra
NPM : 1511030136
Jurusan/Prodi : Manajemen Pendidikan Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**PERAN KOMITE MADRASAH DALAM MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA DI PESANTREN TAHFIZ QUR’AN BANDAR LAMPUNG**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Januari 2020

Penulis

Dadang Saputra
1511030136



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame - Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PERAN KOMITE MADRASAH DALAM MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA DI PESANTREN TAHFIDZ QUR'AN DEWAN DA'WAH LAMPUNG

Nama : DADANG SAPUTRA

NPM : 1511030136

Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam

Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan

MENYETUJUI

**Untuk di munaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Dr. Hj. Eti Hadiati, M.Pd
NIP. 196407111991032003

Pembimbing II

Dr. H. Amirudin, M.Pd.
NIP. 196903051996031001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Manajemen Pendidikan Islam

Dr. Hj. Eti Hadiati, M.Pd
NIP. 196407111991032003



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame – Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PERAN KOMITE MADRASAH DALAM MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA DI PESANTREN TAHFIDZ QUR’AN DEWAH DA’WAH LAMPUNG”** disusun oleh, **DADANG SAPUTRA, NPM: 1511030136**, program studi Manajemen Pendidikan Islam, telah di Ujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : **Selasa/4 februari 2020 Pukul 13.00-14.30 WIB. Di Ruang Sidang Jurusan Manajemen Pendidikan, Islam Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan, UIN Raden Intan Lampung.**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. H. Subandi, MM

Sekretaris : Sri Purwanti N, M.Pd

Pembahas Utama : Dr. Agus Pahrudin, M.Pd

Penguji Pendamping I : Dr. Hj. Eti Hadiati, M.Pd

Penguji Pendamping II : Dr. H. Amirudin, M.Pd.I

Mengetahui,
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

Prof. Dr. Hj. Nirya Diana, M.Pd
NIP. 196208281988032002



MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ

تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹

(QS. Al-Baqarah:59)

¹ Al-mumayyaz Al-qur'an tajwid warna, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), h.88

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT. Semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah-Nya. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang sangat berjasa dalam yang telah memberikan cinta, kasih, perhatian serta memberikan motivasi terhadap studiku:

1. Kedua orang tuaku yang sangat aku cintai dan sayangi, ayahandaku Jahir dan ibundaku Sumini, yang selama ini memberikan kasih sayang kepadaku, mendukung baik secara moril maupun materil, yang senantiasa mendengarkan keluh kesahku dan yang selalu memotivasi yang semua tak akan mungkin dapat terbalaskan olehku, serta tiada henti mendoakan demi keberhasilanku. Terimakasih tak terkira untuk kedua orang tuaku. Semoga skripsi ini menjadi buktiku kepada mereka, dan menjadi awal kesuksesan seperti yang mereka do'akan.
2. Kakak, Mbak dan adikku tersayang, Mas Eko Wahyudi, Mbak Dwi Mutiani dan Adikku Anisa Falupi yang selalu memberikan motivasi, semangat dan do'a sehingga bisa menyelesaikan studiku.
3. Kepada Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang sangat kubanggakan.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Dadang Saputra, lahir di Kedaung, Kota Bandar Lampung, pada tanggal 1 maret 1997, anak ke-3 dari 4 bersaudara. Dari pasangan Bapak Jahir dan Ibu Sumini.

Penulis mulai pendidikan formal tingkat dasar di SD N 2 Beringin Raya lulus pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah di SMP N 13 Bandar Lampung lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan ke tingkat atas di SMA N 14 Bandar Lampung lulus pada tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu ke Perguruan Tinggi UIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Manajemen Pendidikan Islam (MPI) program Studi Strata Satu (S1).

Selama menempuh pendidikan di SD penulis pernah menjadi anggota pramuka. Di SMP penulis mengikuti kegiatan ekstra kulikuler Sepakbola. Dan di SMA penulis mengikuti kegiatan futsal.

Bandar Lampung, 2020

Penulis,

Dadang Saputra

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, kemudian shalawat serta salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa manusia dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang yakni adanya islam, yang telah membawa ajaran yang paling sempurna dan diantaranya yaitu menganjurkan kepada manusia untuk menuntut ilmu pengetahuan agar dapat dimanfaatkan dalam segala aspek kehidupan.

Dalam rangka penyelesaian skripsi tersebut, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, petunjuk dari berbagai pihak, baik berupa material maupun spiritual, untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah menyumbang tenaga, pikiran maupun ilmu pengetahuan. Begitu pula kepada seluruh dosen/asisten serta seluruh karyawan dan karyawan Fakultas Tarbiyah UIN Raden Intan Lampung. Dan penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Hj. Nirva Diana, M.Pd selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung
2. Dr. Hj. Eti Hadiati, M.Pd selaku ketua jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
3. Dr. Hj. Eti Hadiati, M.Pd selaku Pembimbing I (satu) dan Dr. H. Amirudin, M.Pd.I selaku Pembimbing II (dua) yang telah banyak mengarahkan dan membimbing penulis dengan sabar, tulus, dan ikhlas sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

4. Ustadz Syaif Umar, S.Sos (Al-Hafidzh) selaku Pimpinan Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Dewan Da'wah Lampung, yang telah memberikan izin untuk mengadakan penelitian dimadrasah yang dipimpinnya. Serta memberikan informasi yang penulis perlukan dalam penyusunan skripsi.
5. Sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu memberikan motivasi dan semangatnya kepadaku Agus Setiawan, Ahmad Subarkah, Amelia Eka Safitri dan Emi Istiyana.
6. Rekan-rekan seperjuangan khususnya jurusan MPI kelas B angkatan 2015, Teman-teman KKN 99 Desa Way Galih, teman-teman PPL 49 terimakasih atas kebersamaan yang terjalin selama ini, terimakasih atas motivasi dan dukungannya.
7. Seluruh jajarannya Civitas Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, serta seluruh karyawan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung, dengan bantuan tersebut penulis mengucapkan banyak terimakasih, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan ampunannya bagi hambahambanya yang telah mempersembahkan yang terbaik kepada sesama.

Penulis sadar akan kekurangan dalam penulisan ini, itu karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan penulisan oleh sebab itu tentunya skripsi ini sudah pasti banyak kekurangannya. Sudilah kiranya untuk memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya, dan atas amal baik semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini semoga mendapatkan imbalan pahala dari Allah SWT. Amin.

Bandar Lampung, Januari 2020
Penulis,

Dadang Saputra
NPM. 1511030136

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Memilih Judul	2
D. Fokus Penelitian	10
E. Sub Fokus	10
F. Rumusan Masalah	10
G. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
H. Metode Penelitian	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Komite Madrasah	
1. Pengertian Komite Madrasah	24
2. Pembentukan Komite Madrasah	26
3. Kedudukan Komite Madrasah	28
4. Tujuan Komite Madrasah	29
5. Peran dan Fungsi Komite Madrasah.....	29

B. Manajemen Sarana dan Prasarana Madrasah	
1. Pengertian Manajemen Sarana dan Prasarana Madrasah	45
2. Tujuan Sarana dan Prasarana Madrasah.....	48
3. Prinsip Manajemen Sarana dan Prasarana pendidikan	49
4. Proses Manajemen Sarana dan Prasarana	51
C. Tinjauan Pustaka	60
D. Kerangka Berfikir.....	64
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	
1. Sejarah Singkat Berdirinya Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Dewan Da'wah Lampung	66
2. Visi, Misi dan Tujuan Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Dewan Da'wah Lampung	67
3. Profil Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Dewan Da'wah Lampung ..	68
B. Deskripsi Data Penelitian.....	69
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	75
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	92
B. Rekomendasi.....	93
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis mengurai skripsi ini lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian judul skripsi “Peran Komite Madrasah dalam Manajemen Sarana dan Prasarana di Pondok Pesantren Tahfidz Qur’an Dewan Da’wah Lampung”

Adapun penjelasan istilah-istilah judul tersebut adalah:

1. Komite Madrasah

“Komite madrasah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.”¹

2. Manajemen Sarana dan Prasarana

manajemen sarana dan prasarana adalah kegiatan yang mengatur untuk mempersiapkan segala peralatan atau material bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Manajemen sarana dan prasarana dibutuhkan untuk membantu kelancaran proses belajar mengajar.²

¹ Tim Dosen FIP-IKIP Malang, *pengantar dasar-dasar kependidikan* (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), h. 148

² Dr.Matin,M.Pd, *manajemen sarana dan prasarana pendidikan*, (Jakarta: Raja grafindo persada, 2016), h. 26

3. Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Dewan Da'wah Lampung

Yaitu suatu lembaga pendidikan menengah pertama yang berada dibawah naungan Dewan Da'wah Lampung, Merupakan tempat penulis mengadakan penelitian atau objek penelitian.

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan skripsi ini suatu penelitian untuk mengungkap dan membahas secara lebih dalam mengenai "Peran Komite Madrasah dalam Manajemen Sarana dan Prasarana di Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Lampung.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang melatar belakangi penulis membahas skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Komite madrasah merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan persekolahan, jalur pendidikan madrasah maupun jalur pendidikan luar madrasah.
2. Komite madrasah pondok pesantren tahfidz qur'an dewan da'wah lampung melakukan perannya dengan baik, sehingga madrasah yang dikelolanya bisa berkembang dengan baik.

C. Latar Belakang Memilih Judul

Pendidikan merupakan aspek penting yang harus dimiliki oleh setiap orang, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Negara-negara yang ada di seluruh dunia. Dengan adanya pendidikan diharapkan dapat membentuk

manusia yang berkualitas, mandiri dan tentunya berguna bagi kemajuan bangsa dan negaranya. Dengan adanya pendidikan maka hidup seseorang akan lebih terkontrol dan terkendali dalam menjalani hidup. Pada dasarnya pendidikan dapat diperoleh seseorang tidak hanya di madrasah saja, itu sebabnya kita mengenal adanya pendidikan informal, pendidikan nonformal, dan pendidikan formal.

Kita tahu bahwa pendidikan tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, tetapi masyarakat dan orang tua. Pernyataan itu di dukung dalam UU nomor 20 tahun 2003, pada salah satu misalnya dijelaskan agar pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kemudian masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pembelajaran pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan atau komite madrasah.³

Komite madrasah memiliki tugas seperti halnya badan lain yang ada dalam susunan organisasi madrasah. Tugasnya tersebut tentunya juga berhubungan dengan upaya peningkatan kelancaran pendidikan di madrasah.⁴ Dalam menjalankan tugasnya dimadrasah, komite madrasah menjalin komunikasi dengan kepala madrasah sebagai orang yang memiliki jabatan tertinggi dari pihak madrasah. Menurut Kemendiknas No. 44 tahun 2002 menjelaskan bahwa tugas utama dari komite madrasah yaitu membantu upaya untuk meningkatkan dan menyalurkan kelancaran penyelenggaraan

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003

⁴ Tim Dosen FIP-IKIP Malang, *pengantar dasar-dasar kependidikan* (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm. 148

pendidikan di madrasah, baik langsung maupun tidak langsung, dengan mendayagunakan kemampuan yang ada tidak hanya bersifat material keuangan, tetapi juga bersifat non material seperti berperan dalam memberikan pertimbangan, mendukung, mengontrol, dan memonitor atau penyalur pemikiran di madrasah.

Keberadaan dan peran komite madrasah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan madrasah di berbagai daerah sangat bervariasi, baik dari segi status, kinerja, peran, kualitas madrasah, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh komite madrasah. Berkaitan dengan kelembagaan tersebut perlu adanya dukungan pemerintah terhadap keberadaan komite madrasah. Oleh karena itu, perlu adanya suatu penelitian yang berkaitan dengan komite madrasah untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang komite madrasah yang terjadi selama ini.⁵

UU sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 56 ayat 1 menjelaskan bahwa masyarakat memiliki peran dalam meningkatkan mutu pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program melalui dewan pendidikan dan komite madrasah. Oleh karena itu, kepala madrasah harus menyadari adanya peran masyarakat yang terdiri dari masyarakat, orang tua dan organisasi pendidikan. Peran serta masyarakat memiliki wadah di satuan pendidikan yang disebut dengan komite madrasah yang membantu madrasah dalam peningkatan pendidikan. Komite madrasah merupakan organisasi mandiri.

⁵ Wahyu dwi mulyono. 2014. Peran Komite Madrasah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan SMK di Kabupaten Lamongan Jawa Timur. *Jurnal pendidikan vokasi*. Vol 4. No.3 hal 3

Pada dasarnya posisi komite madrasah berada di tengah-tengah antara orang tua murid, murid, guru, masyarakat setempat, dan kalangan swasta di satu pihak sebagai institusi, kepala madrasah. Dinas pendidikan wilayahnya, dan pemerintah daerah di pihak lainnya. Peran komite madrasah diharapkan dapat menjembatani kepentingan keduanya. Secara umum, peran komite madrasah yaitu mewadahi dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan serta meningkatkan tanggungjawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan guna menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan pendidikan.

Peran komite madrasah telah diatur dalam keputusan menteri pendidikan nasional no.044/U/2002 yaitu sebagai badan pemberi pertimbangan, pendukung dan pengawas dalam penyelenggara pendidikan. Salah satu tujuan komite madrasah sesuai dengan yang tertulis pada kepmendiknas nomor 044/U/2002 yaitu menciptakan kondisi yang transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan di satuan pendidikan. Menurut M. Misbah komite madrasah sebagai badan pertimbangan dalam perencanaan memiliki peran mengidentifikasi sumber daya pendidikan, serta memberi masukan dan pertimbangan dalam penetapan RAPBS.⁶

Pengelolaan sumber daya pendidikan seperti SDM, sarana prasarana, dan alokasi anggaran memerlukan peran komite madrasah sebagai penasehat

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003

dalam mengidentifikasi potensi sumber daya pendidikan di masyarakat. Ketika madrasah kurang memiliki fasilitas yang memadai, maka komite madrasah berfungsi memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana. Komite madrasah sebagai pengawas harus melakukan pengawasan terhadap pengawasan program. Komite madrasah sebagai mediator yaitu penghubung madrasah dengan dinas pendidikan. Sebagai contoh, mengkomunikasikan pengaduan dan keluhan masyarakat tentang madrasah dan penyalur aspirasi masyarakat terhadap madrasah. Namun demikian tidak semua tugas dari komite madrasah yang ada di setiap organisasi dapat berjalan dengan baik, banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Salah satu faktor yang menyebabkan kinerja komite madrasah kurang maksimal misalnya kurangnya kerjasama dan komunikasi yang dilakukan antara pihak madrasah dengan komite madrasah. Hal ini membuat sebagian besar kepala madrasah pada umumnya cenderung terlalu dominan dalam mengambil keputusan terkait pengambilan keputusan terkait pembuatan program madrasah, karena merasa bahwa komite madrasah yang ada dimadrasah nya tidak memberikan pengaruh yang besar dalam upaya penyelenggaraan pendidikan di madrasah.

Sarana dan prasarana merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pendidikan. Menurut ketentuan umum permendiknas no.24 tahun 2007, sarana adalah perlengkapan yang dapat di pindah-pindah, sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi madrasah. Menurut A.L Hartani desain pembelajaran memerlukan adanya sarana dan prasarana berupa gedung atau ruang kelas, media atau alat

pembelajaran, perpustakaan, laboratorium, barang praktek, dan sarana olahraga. Fasilitas yang tersedia harus dikelola dengan baik supaya dapat dimanfaatkan secara optimal. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai akan mendukung terlaksananya pendidikan di madrasah, karena memberikan kenyamanan pada siswa. Seluruh pihak madrasah dan komite madrasah memiliki kewajiban yang sama untuk mengelola ketersediaan sarana dan prasarana di satuan pendidikan.

Dalam Al-Qur'an ayat yang menunjukkan bahwa pentingnya sarana dan prasarana atau alat dalam pendidikan. Makhluk berupa hewan yg di jelaskan dalam Al-Qur'an juga bisa menjadi alat dalam pendidikan. Seperti nama salah satu surat dalam Al-Qur'an adalah An-Nahl yang artinya lebah. Allah SWT berfirmaman dalam sura An-Nahl ayat: 68-69

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۚ

"Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, Buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia," (QS. An-Nahl 16: Ayat 68)

ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۗ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"kemudian makanlah dari segala (macam) buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berpikir." (QS. An-Nahl 16: Ayat 69)⁷

Jelas bahwa ayat di atas menerangkan bahwa lebah bisa menjadi media atau alat bagi orang-orang yang berpikir untuk mengenal kebesaran Allah

⁷ Al-mumayyaz Al-qur'an tajwid warna, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014). h.274

SWT yang pada gilirannya akan meningkatkan keimanan dan kedekatan (taqarrub) seseorang hamba kepada Allah SWT.

Manajemen adalah rangkaian segala kegiatan yang menunjukkan kepada usaha kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan tertentu. Manajemen merupakan suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang telah bergabung, untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah di tetapkan sebelumnya.

Menurut Rugaiyah manajemen sarana dan prasarana adalah kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh madrasah supaya dalam upaya menunjang seluruh kegiatan baik kegiatan pembelajaran maupun kegiatan lain sehingga seluruh kegiatan berjalan dengan lancar. Menurut Asmani, manajemen sarana dan prasarana adalah manajemen sarana madrasah dan sarana bagi pembelajaran, yang meliputi ketersediaan dan pemanfaatan sumber belajar bagi guru, siswa serta penataan ruangan ruangan yang dimiliki.⁸

Ruang kelas beserta isinya merupakan bagian dari sarana pembelajaran. Menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2007 ruang kelas berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pembelajaran teori, praktik yang tidak menggunakan peralatan khusus, atau praktik dengan alat yang mudah dihadirkan. Ruang kelas untuk pembelajaran harus memuat kursi siswa sebanyak siswa yang ada, meja siswa yang cukup untuk digunakan siswa di satu kelas, kursi dan meja guru, lemari, rak hasil siswa, papan panjang, papan

⁸ Dr.Matin,M.Pd, *manajemen sarana dan prasarana pendidikan*, (Jakarta: Raja grafindo persada, 2016), hlm 24

tulis, tempat sampah, tempat untuk mencuci tangan, jam dinding, dan kotak sampah. Sarana pembelajaran ini harus tersedia di ruang kelas untuk mendukung terjadinya pembelajaran yang nyaman.

Sarana dan prasarana pendidikan dapat disimpulkan bahwa, sarana pendidikan adalah alat atau media yang digunakan secara langsung untuk melengkapi kebutuhan sebagai penunjang proses pembelajaran, sehingga kegiatan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan yang di harapkan. Bukan hanya prasarana, sarana pendidikan juga perlu mendapatkan perhatian, karena jika kelengkapan sarana pendidikan tidak tersedia ketika diperlukan, maka akan jadi penghambat berlangsungnya proses pembelajaran. Sedangkan prasarana itu sendiri dapat disimpulkan sebagai fasilitas tidak langsung yang dapat menunjang keberhasilan proses pembelajaran, misalnya: halaman madrasah, UKS, taman toga, toilet dan lain sebagainya yang ikut serta memperlancar proses pembelajaran di madrasah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa komite madrasah dalam manajemen sarana dan prasarana merupakan badan pemberi pertimbangan, pendukung dan pengawas dalam bentuk alat atau media untuk melengkapi kebutuhan sebagai penunjang proses pembelajaran agar tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Komite madrasah dalam manajemen sarana dan prasarana dilakukan dengan mengupayakan perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama.

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan oleh peneliti diatas, maka fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah peran komite madrasah dalam manajemen sarana dan prasarana di pondok pesantren tahfidz qur'an dewan da'wah lampung.

E. Sub Fokus

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas, maka peneliti melaksanakan penelitian secara fokus dengan terdapat batasan-batasan masalah dalam penelitian ini, menurut kepmendiknas No: 044/U/2002 peran dari komite madrasah adalah sebagai berikut:

1. Peran komite madrasah sebagai pemberi pertimbangan dalam manajemen sarana dan prasarana
2. Peran komite madrasah sebagai pendukung dalam manajemen sarana dan prasarana
3. Peran komite madrasah sebagai pengontrol dalam manajemen sarana dan prasarana
4. Peran komite madrasah sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakatcs dalam manajemen sarana dan prasarana

F. Rumusan Masalah

Dalam jenis penelitian apa pun, masalah merupakan suatu titik tolak ukur penelitian. Hal ini dapat diartikan bahwa suatu masalah adalah merupakan suatu sumber fokus objek material yang akan diteliti. Adapun

suatu fokus penelitian merupakan sumber penjabaran masalah yang dirumuskan dalam suatu penelitian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran komite madrasah sebagai pemberi pertimbangan dalam manajemen sarana dan prasarana?
2. Bagaimana peran komite madrasah sebagai peran pendukung dalam manajemen sarana dan prasarana?
3. Bagaimana peran komite madrasah sebagai pengontrol dalam manajemen sarana dan prasarana?
4. Bagaimana peran komite madrasah sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat dalam manajemen sarana dan prasarana?

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam bagaimana peran komite madrasah dalam manajemen sarana dan prasarana di Pesantren Tahfidz Qur'an Dewan Da'wah Lampung.

Adapun manfaat yang dari penelitian ini adalah:

1. Bagi komite madrasah

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi komite madrasah tentang pentingnya peran komite madrasah sebagai pengawas dalam suatu instansi pendidikan di Pesantren Tahfidz Qur'an Dewan Da'wah Lampung.

2. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti sebagai hasil pengalaman langsung khususnya terkait dengan peran komite sekolah dalam manajemen sarana dan prasarana di Pesantren Tahfidz Qur'an Dewan Da'wah Lampung.

3. Bagi Pondok Pesantren

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan, bahan pertimbangan, dan sumber data guna perbaikan, pengalaman, dan peningkatan dalam dunia pendidikan khususnya dalam pengembangan badan pemberi pertimbangan Peran komite madrasah dalam manajemen sarana dan prasarana di Pesantren Tahfidz Qur'an Dewan Da'wah Lampung.

4. Bagi Pembaca

Berguna sebagai sebuah informasi dan bahan masukan bagi perumusan konsep tentang peran komite madrasah dalam manajemen sarana dan prasarana dalam pengawasan keberlangsungan sarana dan prasarana di pondok pesantren yang diawasi.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁹ Penelitian adalah terjemahan dari kata Inggris *research*. Dari istilah itu ada juga ahli yang

⁹Sugiyono, *Manajemen Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 17

menerjemahkan *research* sebagai *riset*. *Research* itu sendiri berasal dari kata *re*, yang berarti “kembali” dan *to search* yang berarti mencari. Dengan demikian arti sebenarnya dari *research* atau riset adalah “mencari kembali”.

Menurut kamus *Webster's New International*, penelitian adalah penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip, suatu penyelidikan amat cerdas untuk menetapkan sesuatu.

Menurut ilmuan Hillway, penelitian tak lain dari suatu metode studi hati sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang terhadap masalah tersebut. Whitney, menyatakan bahwa di samping untuk memperoleh kebenaran, kerja menyelidiki harus dilakukan secara sungguh-sungguh dalam waktu yang lama. Dengan demikian penelitian merupakan suatu metode untuk menemukan kebenaran, sehingga penelitian juga merupakan metode berpikir secara kritis dan sistematis.¹⁰

Penelitian menurut Cholid Nabuka adalah “pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan data dan penafsiran fakta-fakta.”¹¹ Sedangkan menurut Sutrisno Hadi, penelitian adalah : sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan, usaha-usaha yang dilakukan dengan cara menggunakan metode-metode ilmiah.¹²

¹⁰Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Agama dan Humaniora*, (Yogyakarta: Paradigma, 2012), h. 1

¹¹Cholid Nabuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 1

¹²Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Psikologi UGM, 1983), h. 4

Penelitian juga bertujuan untuk mengubah kesimpulan-kesimpulan yang telah diterima, atau mengubah dalil-dalil (bagi penelitian ilmu-ilmu alam) dengan adanya aplikasi baru dalil-dalil tersebut. Dari itu, penelitian dapat diartikan sebagai pencarian pengetahuan dan pemberi artian yang terus-terusan terhadap sesuatu. Penelitian juga merupakan pengkajian yang hati-hati dan kritis untuk menemukan sesuatu yang baru.¹³

Jadi, dapat disimpulkan dari beberapa pendapat di atas, bahwasannya metode penelitian adalah ilmu yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian. Sehubungan dengan uraian diatas, ini disebutkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang berupa kata-kata tertulis dari orang-orang yang telah ditentukan sebelumnya. Maka laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian data lapangan. Data tersebut mungkin berasal dari catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo, atau dokumen resmi lainnya.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif merupakan “narasumber”, atau partisipasi, informan, teman dan pendidikan dalam penelitian.”¹⁴ Sementara sumber data dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan tehnik “*purposive sampling*”. Menurut Sugiono *purposive sampling* adalah pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, seperti orang

¹³Kaelan, *Op-Cit*, h. 3

¹⁴Sugiono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 289

tersebut dianggap paling tahu tentang persoalan yang akan diteliti, yakni guru dan siswa.¹⁵

Adapun langkah untuk menentukan sumber data adalah: informa yang terlibat langsung dalam permasalahan penelitian ini, diantaranya adalah kepala komite dan kepala sarana dan prasarana Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Bandar Lampung.

3. Partisipasi dan Tempat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berkeinginan untuk meneliti di Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Bandar Lampung dengan mengambil studi kasus lapangan. Dipilihnya Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Bandar Lampung sebagai lokasi penelitian karena pertimbangan dan alasan, pertama Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Bandar Lampung merupakan madrasah yang bernuansa islami, dan merupakan pondok pesantren yang ada di Bandar Lampung yang memiliki tujuan menciptakan lulusan yang hafal Al-Qur'an, dan berdasarkan hasil wawancara pra survey dengan kepala madrasah Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Bandar Lampung, Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an merupakan lembaga pendidikan dibawah naungan Dewan Dakwah Lampung yang tujuannya untuk mencetak lulusan yang unggul serta hafal Al-qur'an.

Wawancara dilakukan dengan Pimpinan Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an, Waka Humas Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an, Guru dan Staf TU Pesantren Tahfidz Qur'an Dewan Da'wah Lampung.

¹⁵*Ibid*, h. 300

4. Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang paling strategis dalam suatu penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data, dan bersumber pada data tersebut peneliti dapat melakukan analisis yang pada akhirnya peneliti akan mendapatkan substansi yang dipermasalahkan dalam rumusan masalah penelitian.

Dalam pengumpulan data di lapangan, maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Pengertian observasi secara *terminologis* dimaknai sebagai pengamatan atau peninjauan secara cermat. Menurut Nasution, bahwa observasi adalah merupakan dasar semua ilmu pengetahuan.¹⁶ Sedangkan menurut Sutrisno Hadi, mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi *participant observation* (observasi berperan serta) dan *non participant observation*, selanjutnya dari segi instrumentasi yang digunakan, maka observasi dapat dibedakan menjadi *observasi*

¹⁶Kaelan, *Op-Cit*, h. 100

terstruktur dan tidak terstruktur.¹⁷ Jadi *observasi* adalah suatu pengamatan terhadap objek yang diteliti baik secara langsung maupun secara tidak langsung, untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.¹⁸

2. Metode Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data yang dilakukan dengan cara menanyakan kepada responden secara langsung dan bertatap muka tentang beberapa hal yang diperlukan dari suatu fokus penelitian. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.¹⁹

Menurut Sutrisno Hadi, mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode *interview* dan juga dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode *interview* dan juga *kuesioner* (angket) adalah sebagai berikut.²⁰

- a. Bahwa subjek (*responden*) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.
- b. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.

¹⁷Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 204

¹⁸Kaelan, *Op-Cit*, h. 101

¹⁹abd. Rahman A. Ghani, *Metodologi Penelitian Tindakan Madrasah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014

²⁰Sugiono, *Op-Cit*, h.194

- c. Bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan penelitian kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.²¹

3. Metode Dokumentasi

Dokumen adalah merupakan catatan peristiwa yang telah lalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang lainnya.²² Metode dokumentasi adalah sejumlah besar data yang tersedia adalah data verbal yang terdapat dalam surat-surat, format-format, catatan harian (jurnal), kenangan-kenangan (memoris), laporan-laporan dan sebagainya. Kumpulan data verbal ini disebut dokumen dalam arti yang sempit. Sedangkan dalam arti yang luas meliputi monument, artifak, foto, tips, dan lain sebagainya.²³

Metode ini penulis gunakan untuk meneliti dokumen yang terdapat pada Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Bandar Lampung yaitu seperti keadaan tanah dan bangunan madrasah, fasilitas-fasilitas di madrasah, daftar guru, dan karyawan, keadaan siswa, struktur organisasi, dan data-data tertulis yang berhubungan dengan mengembangkan madrasah.

5. Prosedur Analisis Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, dilakukan ada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis

²¹*Ibid.* h.195

²²Kaelan, *Op-Cit*, h. 126

²³Koentjara Ningrat, *metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Utama, 1994), h. 46

yang diperoleh selanjutnya dikembangkan pada hubungan tertentu. Pengertian analisis data menurut Patton, yaitu suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.²⁴

Langkah-langkah yang ditempuh penulis dalam menganalisa data adalah sebagai berikut:

a. Reduksi data adalah proses analisis merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.²⁵

Menurut Nasution, Reduksi data dapat pula membantu dalam memberikan kode kepada aspek-aspek tertentu.²⁶

b. Penyajian Data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antara kategori. Untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Dengan penyajian seperti itu diharapkan informasi tertata dengan baik dan benar menjadi bentuk yang padat dan mudah dipahami untuk menarik sebuah kesimpulan.

c. Verifikasi Data

²⁴Kaelan, *Op-Cit*, h. 130

²⁵Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 11

²⁶Kaelan, *Op-Cit*, h. 132

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang bervariasi.²⁷

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah upaya mengkonstruksikan dan menafsirkan data untuk menggambarkan secara mendalam dan untuk mengenai masalah yang diteliti. Setelah data hasil penelitian terkumpul selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan data yang bersifat kualitatif yang dapat diartikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Dalam penarikan kesimpulan dilakukan dengan berfikir induktif, yaitu kesimpulan yang tertarik atas dasar data empiris setelah sebelumnya dilakukan verifikasi data.²⁸ Dengan data lain, dalam metode penelitian kualitatif, teknik analisis data yang

²⁷Sugiono, *Op-Cit*, h. 345

²⁸Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah, Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi*, (Bandung: Sinar Baru Algensido Offset, 1999), h. 86

digunakan induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertulis.

6. Uji Keabsahan Data

Hasil dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti harus dipertanggungjawabkan keabsahannya, karena tidak mungkin dalam melakukan sebuah penelitian tidak diadakannya sebuah pengecekan ulang oleh peneliti, maka dari itu yang akan dilakukan oleh peneliti untuk melakukan pemeriksaan ialah keabsahan datanya.

Untuk menentukan keabsahan suatu data diperlukan sebuah teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu *credibility* (derajat kepercayaan), *transferability* (keteralihan), *depenbality* (keberantungan), dan *confirmability* (kepastian).²⁹ Uji keabsahan data data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas. Dalam pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap suatu data hasil penelitian ada beberapa cara. Cara yang digunakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik triangulasi.

Triangulasi dalam pengujian kreabilitas ini diartikan sebagai pengecekan suatu data dari berbagai sumber dengan berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, triangulasi waktu, dan triangulasi teori.

²⁹Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.270

Berikut penjelasan dari berbagai jenis triangulasi dalam penelitian kualitatif, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas data tentang perilaku murid, maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dapat dilakukan ke guru, teman murid yang bersangkutan dan orang tuanya. Data dari ke tiga sumber tersebut, tidak bisa dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data tersebut.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk

memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kreabilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kreabilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.³⁰

Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

³⁰Sugiono, *Op-Cit*, h. 374

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Komite Madrasah

1. Pengertian Komite Madrasah

Menurut Sanafiah Faisal hubungan antara madrasah dan masyarakat dapat dilihat dari dua segi, yaitu: madrasah sebagai partner dari masyarakat dalam melakukan fungsi pendidikan, dan madrasah sebagai produser yang melayani pesanan-pesanan pendidikan dari lingkungan masyarakat.¹ Untuk itu, madrasah dan masyarakat harus bekerja sama dan bertanggung jawab dalam proses pendidikan disamping tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Dengan kata lain keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, pihak madrasah, orang tua dan masyarakat atau *stakeholder* pendidikan.

Supaya tidak terjadi tumpang tindih beban dan tanggung jawab di antara *stakeholder* pendidikan. Maka diperlukan suatu lembaga yang Independen, Demokrasi, Transparan yang dapat dipercayakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk mewadahi peran dan tanggung jawab serta wewenang yang seimbang dan *profesional* antara madrasah, wali murid, dan masyarakat serta *stakeholder* lainnya, maka untuk itu dibentuklah komite madrasah.

¹ Tim Dosen FIP-IKIP Malang, *pengantar dasar-dasar kependidikan* (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), h. 148

Komite madrasah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pendidikan pramadrasah, jalur pendidikan madrasah maupun jalur pendidikan luar madrasah.²

Dalam UU RI No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pasal 54 ayat 3 dinyatakan bahwa: Komite madrasah adalah lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.³

Menurut Mulyasa komite madrasah merupakan suatu lembaga yang perlu dibentuk dalam rangka pelaksanaan MBS (Manajemen Berbasis Madrasah) dan KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi). Anggota komite madrasah terdiri dari kepala madrasah, guru, beberapa tokoh masyarakat, serta orang tua yang memiliki potensi dan perhatian besar terhadap pendidikan.

Menurut Rusman komite madrasah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan disatuan pendidikan baik pada pendidikan pramadrasah, jalur pendidikan madrasah, maupun jalur pendidikan luar madrasah. Nama badan disesuaikan dengan kondisi yang ada dan kebutuhan masing- masing satuan pendidikan, seperti Komite madrasah,

² Hasbullah, *Ibid.*,h. 89-90

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003

Komite Pendidikan, Komite Pendidikan Luar madrasah, Dewan madrasah, Majelis Madrasah, Majelis Madrasah, atau nama lain yang disepakati.

Azas legalitas komite madrasah termuat dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya dalam pasal 56 ayat 3 yang berbunyi “Komite madrasah/Madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan”.⁴

Berdasarkan berbagai kajian mengenai pengertian Komite Madrasah diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa Komite Madrasah merupakan badan yang berkedudukan pada satuan pendidikan yang mewadahi peran serta masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di madrasah.

2. Pembentukan Komite Madrasah

Pembentukan komite madrasah dapat menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap madrasah. Di sisi lain, madrasah dapat mengurangi ketergantungan kepada pemerintah yang banyak mengintervensi proses pembelajaran di madrasah. Dengan intervensi tersebut madrasah tidak dapat berkembang secara mandiri, khususnya dalam meningkatkan mutu pembelajarannya. Intervensi tersebut juga menyebabkan madrasah cenderung patuh dan menjalankan perintah dari atasan saja.

⁴ Wahyu dwi mulyono. 2014. Peran Komite Madrasah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan SMK di Kabupaten Lamongan Jawa Timur. *Jurnal pendidikan vokasi*. Vol 4. No.3 h. 3

Menurut Syaiful Sagala dibentuknya komite madrasah diharapkan mampu meminimalisir peran kepala madrasah yang masih dominan dalam pembuatan program madrasah. Dominasi kepala madrasah terlihat dari berjalannya roda organisasi madrasah yang cenderung menerapkan pola otoritarian, yaitu pada saat memutuskan segala sesuatunya tanpa pertimbangan dari berbagai pihak, terutama dalam membuat berbagai program dimadrasah. Hal ini, membuat komite madrasah tidak dapat memberikan masukan kepada madrasah.

Menurut Hasbullah, pembentukan komite madrasah di madrasah masih banyak hanya untuk formalitas saja. Padahal peran dan fungsi komite madrasah telah diatur dalam undang-undang. Meskipun komite madrasah dan madrasah bersifat mandiri, tetapi harus menjadi mitra dan saling bekerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan.

Ali Mustadi menyatakan bahwa pembentukan dewan pendidikan dan komite madrasah tidak terlepas dari upaya mensinergikan dukungan dan peran serta masyarakat untuk bersama-sama madrasah mengusahakan tercapainya peningkatan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan secara demokratis dan akuntabel dalam rangka tujuan pendidikan nasional.⁵

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan di bentuknya komite madrasah yaitu untuk membantu peran kepala madrasah dalam membentuk

⁵ Fandhi Yusuf. 2015. Peran Komite Madrasah Dalam Upaya Peningkatan Mutu Pembelajaran di SD Unggulan Aisyiyah Bantul. *Jurnal pendidikan guru madrasah dasar*. Edisi 16 tahun ke IV. H. 4

program madrasah dan mensinergikan dukungan dan peran masyarakat agar tercapainya pengelolaan pendidikan yang efektif dan efisien.

3. Kedudukan Komite Madrasah

Berdasarkan Kepmendiknas nomor 44/U/2002 tanggal 2 April 2002 mengenai Acuan Pembentukan Komite Madrasah, kedudukan dan sifat komite madrasah adalah sebagai berikut.

- a. Komite Madrasah berkedudukan di satuan pendidikan
- b. Komite madrasah dapat terdiri dari satuan pendidikan, atau beberapa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama, atau beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang tetapi berada pada lokasi yang berdekatan, atau 30 satuan-satuan pendidikan yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan, atau karena pertimbangan lainnya.
- c. Badan ini bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan lembaga.

Komite madrasah berkedudukan pada satuan pendidikan madrasah, pada seluruh jenjang pendidikan, pendidikan dasar, (SD dan SMP/Madrasah ibtdaiyah dan Madrasah Tsanawiyah), hingga pendidikan menengah (SMA/Madrasah Aliyah), baik madrasah negeri maupun swasta.

Satuan pendidikan dari berbagai jalur, jenjang dan jenis pendidikan memiliki, penyebaran lokasi dan beragam. Ada madrasah tunggal, dan adapula beberapa madrasah yang menyatu dalam suatu kelompok.

Oleh karena itu maka komite madrasah dapat dibentuk beberapa alternative sebagai berikut:

1. “Komite madrasah/ madrasah yang dibentuk disatuan pendidikan.
2. Terdapat beberapa madrasah/madrasah pada satu lokasi atau beberapa madrasah/madrasah pada satu lokasi yang berdekatan, atau beberapa madrasah yang dikelola oleh penyelenggara pendidikan, atau karena pertimbangan lainnya, dapat dibentuk, koordinator komite madrasah/madrasah.”⁶

4. Tujuan Komite Madrasah

Sebagai sebuah badan yang berkedudukan di satuan pendidikan, komite madrasah tentu memiliki tujuan. Tujuan dari komite madrasah berdasarkan Kepmendiknas Nomor 44 Tahun 2002 yaitu:

- a. “Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan progam pendidikan di satuan pendidikan.
- b. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- c. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.”⁷

5. Peran dan Fungsi Komite Madrasah

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah. Sayangnya ungkapan bijak tersebut, sampai saat ini lebih bersifat slogan dan masih jauh dari harapan yang sebenarnya boleh dikatakan tanggung jawab masing-masing masih belum optimal, terutama

⁶Khaeruddin,dkk. *Kurikulum satuan tingkat pendidikan (KTSP)* (Jogjakarta: Nuansa Aksara, cet, II, 2007), h. 249

⁷ Kepmendikbud No.44 tahun 2002 tentang dewan pendidikan dan komite madrasah

peran serta masyarakat yang sampai saat ini masih dirasakan belum banyak diberdayakan.⁸

Sedangkan berdasarkan Kepmendiknas nomor: 044/U/2002, peran dari Komite Madrasah adalah sebagai berikut:

- a. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
- b. Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- c. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
- d. Mediator antara pemerintah (*eksekutif*) dengan masyarakat di satuan pendidikan.⁹

Peran komite madrasah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*). Dengan kata lain, madrasah dan yayasan pendidikan harus meminta pertanggung jawaban dari kepala madrasah dalam memutuskan kebijakan, program, dan kegiatan madrasah termasuk juga dalam merumuskan visi, misi dan tujuan madrasah.

Seperti yang di kemukakan oleh pantjiastuti bahwa idealnya madrasah dan yayasan harus meminta pertimbangan kepada komite madrasah dalam merumuskan kebijakan, program dan kegiatan madrasah maupun merumuskan visi, misi dan tujuan madrasah. Menurutna, visi, misi dan tujuan madrasah bersifat given, seperti di madrasah swasta dengan ciri khas tertentu. Tetapi terdapat beberapa visi, misi dan tujuan madrasah yang harus dirumuskan

⁸ Khaeruddin, dkk, *Ibid.*, h. 250

⁹ Keputusan Menteri Pendidikan No.044 tahun 2002

bersama dengan komite madrasah seperti program unggulan apa saja yang ingin diterapkan oleh madrasah.

Menurut Sri Renani komite madrasah memiliki peran sebagai advisory agency, badan yang memberikan pertimbangan kepada madrasah atau yayasan. Idealnya, madrasah dan yayasan pendidikan harus meminta pertimbangan kepada Komite Madrasah dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan madrasah, termasuk juga dalam merumuskan visi, misi, dan tujuan madrasah yang bersifat given, seperti di madrasah swasta dengan ciri khas tertentu. Ada beberapa visi, misi dan tujuan madrasah yang harus dirumuskan bersama dengan komite madrasah, seperti program unggulan apa saja yang ingin diterapkan oleh madrasah.¹⁰

Komite madrasah dalam hal ini bertanggungjawab dalam penyusunan perencanaan strategis dan tahunan dalam penyusunan RAPBS (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah), pertimbangan dalam hal kebijakan dan program madrasah, dan memberikan pertimbangan dalam hal pelaksanaan program madrasah, dan memberikan pertimbangan dalam hal pelaksanaan program pendidikan serta penilaian pengelolaan sumber daya

¹⁰Sri Renani Pantjastuti, dkk., *komite madrasah, sejarah dan prospeknya di masa depan* (Yogyakarta: hikayah publishing, 2008), h 81-82

pendidikan berupa pertimbangan tentang potensi sumber daya pendidikan dalam masyarakat, tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, serta anggaran.¹¹

Penerapan komite madrasah/madrasah sebagai *Advisory agency* (pemberi pertimbangan) ini termanifestasi dalam tiga aspek yaitu:

- a. Perencanaan madrasah yang meliputi:
 - 1) Identifikasi sumber daya pendidikan dalam masyarakat,
 - 2) Memberikan masukan untuk penyusunan RAPBS,
 - 3) Menyelenggarakan rapat RAPBS (madrasah, orang tua peserta didik, masyarakat),
 - 4) Memberikan pertimbangan perubahan RAPBS dan ikut mengesahkan RAPBS bersama kepala madrasah.
- b. Pelaksanaan program kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian yang meliputi:
 - 1) Memberikan masukan terhadap proses pengelolaan pendidikan di madrasah,
 - 2) Memberikan masukan terhadap proses pembelajaran kepada para guru.
- c. Penilaian pengelolaan sumber daya pendidikan yang meliputi:
 - 1) Identifikasi potensi sumber daya pendidikan dalam masyarakat,
 - 2) Memberikan pertimbangan tentang tenaga pendidikan yang dapat diperbantukan di madrasah,
 - 3) Memberikan pertimbangan tentang sarana dan prasarana yang dapat diperbantukan madrasah,
 - 4) Memberikan pertimbangan tentang anggaran yang dapat dimanfaatkan di madrasah.¹²

Menurut uraian di atas dapat disimpulkan bahwa komite madrasah sebagai partner kerja madrasah, dalam aplikasinya turut membantu memberi pertimbangan, kebijakan, menyalurkan ide, dan berbagai kebutuhan

¹¹Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, *manajemen pendidikan* (cet. IV, Bandung: Alfabeta, 2011), h 283

¹²Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044 tahun 2002

pendidikan serta menampung dan menganalisa aspirasi dan memberikan rekomendasi kepala madrasah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

Komite madrasah sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan ditingkat satuan pendidikan, minimal dalam memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan. Agar masukan tersebut sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan, diperlukan informasi-informasi yang didasarkan pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Mengadakan pendataan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan sumber daya pendidikan di masyarakat sekitar madrasah
2. Menganalisis hasil pendataan sebagai bahan pemberian masukan pertimbangan dan rekomendasi secara tertulis kepada madrasah
3. Memberikan pertimbangan kepala madrasah dalam rangka mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP)
4. Memberikan pertimbangan kepada madrasah/madrasah untuk meningkatkan mutu pendidikan
5. Memberikan pertimbangan kepada madrasah/madrasah untuk menyelenggarakan pendidikan yang menyenangkan
6. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada madrasah dalam menyusun visi, misi, tujuan, kebijakan, program, dan kegiatan pendidikan dimadrasah.¹³

Komite madrasah dalam prakteknya dapat memberikan pertimbangan, masukan, dan rekomendasi kepada penyelenggara madrasah tidak hanya pada saat dibutuhkan. Tetapi dapat dilakukan pada saat komite madrasah memandang perlu untuk memberikan pertimbangan.¹⁴

¹³ *Ibid.* h 208

¹⁴ Eni Widyaningsih.2016.Peran Komite Madrasah dalam pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran di SDN Serayu.*Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Dasar*.Edisi 10.Tahun ke 5. h. 981

Hubungan komite madrasah dengan madrasah didalam menjalankan peran pengembangan madrasah dapat tercermin dari uraian peran komite madrasah. Pertimbangan mengenai sarana dan prasarana madrasah dalam pengembangan madrasah menjadi perhatian rutin bagi komite madrasah. Komite madrasah dalam mengadakan pengamatan terhadap proses pembelajaran yang dihubungkan dengan kondisi fisik, ditindak lanjuti dengan memberi pertimbangan mengenai sarana dan prasarana madrasah dibahas dalam rapat atau pertemuan madrasah. Sarana dan prasarana yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah menjadi sarana utama dalam pembahasan antara komite madrasah/madrasah dengan madrasah/madrasah.

Komite madrasah memiliki peran sebagai pendukung (*supporting agency*), badan yang memberikan dukungan berupa dana, tenaga, dan pikiran. Jika dahulu komite madrasah lebih sebagai pendukung dana, maka penekanan peran komite madrasah seharusnya bukan pada aspek dana saja melainkan aspek lainnya, terutama berupa gagasan dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

Berkaitan dengan peran komite Madrasah sebagai badan pendukung, dapat dijabarkan kedalam beberapa poin yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya pendidikan di madrasah, termasuk memantau kondisi tenaga kependidikan di madrasah. Selain itu, berperan juga dalam pengelolaan sarana dan prasarana madrasah sehingga dapat memantau kondisi sarana dan

prasana madrasah dan memberikan bantuan langsung sarana dan prasana madrasah.

Komite madrasah dalam prakteknya dapat memberikan dukungan berupa upaya mendorong orang tua siswa dan masyarakat untuk ikut memikirkan dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Dapat pula komite madrasah menggalang dana dari masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dengan menyampaikan terlebih dahulu program madrasah dan program komite madrasah. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat dalam rangka peningkatan mutu pendidikan bagi siswa dan guru merupakan bentuk dukungan yang sangat perlu dikembangkan oleh komite madrasah. Semua dukungan tersebut tidak terlepas dari mekanisme penyampaian melalui lembaga komite madrasah.¹⁵

Peran komite madrasah sebagai pemberi pendukung terhadap dana anggaran menjadi prioritas utama, terutama apabila madrasah mengadakan kegiatan yang menelan biaya melebihi dari yang telah dianggarkan pemerintah. Kegiatan dukungan dalam masalah pendanaan biasanya ditempuh secara prosedural dan berhati-hati. Sikap dengan demikian perlu diambil mengingat telah ada bantuan operasional madrasah (BOS). Namun demikian, demi kepentingan program madrasah, komite madrasah selalu berupaya

¹⁵ *Ibid.* h.108.

mengkomodir permintaan tambahan anggaran untuk kegiatan yang hanya bersifat unggulan.¹⁶

Komite madrasah memiliki peran sebagai pengontrol (*controlling agency*), badan yang melaksanakan pengawasan sosial kepada madrasah. Pengawasan ini tidak sebagai pengawasan institusional sebagaimana yang dilakukan oleh lembaga maupun badan pengawasan seperti inspektorat, atau Badan Pemeriksa Keuangan, maupun badan pengawas fungsional.

Peran Komite Madrasah sebagai pengontrol terhadap perencanaan pendidikan seperti melakukan kontrol terhadap proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di madrasah, termasuk perumusan kebijakan yang ada, dan mengontrol proses perencanaan pendidikan di madrasah. Selain itu, Komite Madrasah juga dapat berperan sebagai pengontrol pelaksanaan program madrasah, di samping alokasi dana dan sumber-sumber dana bagi pelaksanaan program-program tersebut. Fungsi kontrol juga dilakukan dalam kaitannya dengan penilaian terhadap hasil keluaran pendidikan misalnya dengan memantau kualitas hasil ujian akhir madrasah. Dengan demikian komite madrasah sebagai lembaga pengontrol dalam penyelenggaraan pendidikan adalah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan sebagai masukan bagi para pengambil kebijakan dalam rangka

¹⁶ Ibrahim bafadal, *manajemen perlengkapan madrasah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).h.101.

penyempurnaan kebijakan dan program dalam rangka meningkatkan angka keluaran pendidikan.

Komite madrasah dapat melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan yang diambil oleh penyelenggaraan/*manajemen* madrasah, juga dapat melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap program yang telah ditetapkan bersama. Penyelenggaraan pendidikan dimadrasah juga menjadi bagian dari pengawasan komite. Selain itu juga yang tidak kalah pentingnya, yaitu kontrol terhadap keluaran pendidikan dengan harapan bahwa keluaran pendidikan mempunyai masa depan yang dengan bekal yang cukup, kebijakan yang diambil oleh penyelenggara/*manajemen* madrasah yang diperkirakan dapat memberikan berat beban berat bagi siswa maupun masyarakat, dan yang diperkirakan tidak sejalan dengan tujuan madrasah dapat diberikan pengarahannya oleh komite. Penyusunan program bersama komite madrasah, apabila dalam pelaksanaannya ada perbedaan atau tidak sejalan dengan tujuannya, dapat pula dikontrol agar kembali pada upaya pencapaian arah dan tujuan semula. Dalam penyelenggaraan madrasah, komite mempunyai peran kontrol pula. Dalam penyelenggaraan kegiatan madrasah diharapkan memenuhi beberapa harapan agar suasana madrasah benar-benar memiliki rasa nyaman, aman bagi siswa dan para tenaga kependidikan.¹⁷

¹⁷ Sri minarti, *manajemen madrasah: mengelola lembaga pendidikan secara mandiri*, (Jogjakarta: Ar-ruz media, 2012), h.98.

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh komite pada dasarnya ditunjukkan untuk memaksimalkan pencapaian tujuan pengembangan siswa sebagai peserta didik. Pengembangan kehidupan siswa sebagai pribadi sekurang-kurangnya mencakup upaya untuk:

1. Memperkuat dasar keimanan dan ketaqwaan
2. Membiasakan untuk berperilaku yang baik
3. Memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar
4. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani
5. Memberikan kemampuan untuk belajar
6. Membentuk kepribadian yang mantap dan mandiri.¹⁸

Komite madrasah sebagai badan pengontrol kegiatan madrasah meliputi pengawasan dana dan laporan penanggungjawaban. Penggunaan dana yang mendapatkan pengawasan akan menyebabkan tujuan dapat tercapai secara *efektif* dan *efisien*. Kegiatan pengawasan merupakan kegiatan yang *esensial* dalam bidang manajemen. Pengawasan yang ketat dan terkendali membuat madrasah lebih berhati-hati. Kegiatan madrasah yang selalu mendapatkan pengawasan akan memiliki tingkat kemajuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak pernah mendapatkan pengawasan.

Prinsip pengawasan yang dianut komite madrasah bertujuan agar:

1. Memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan anak
2. Memperkokoh tujuan dan meningkatkan kualitas hidup
3. Tetap mengarahkan komite untuk menjalin hubungan yang baik dengan madrasah.¹⁹

¹⁸ *Ibid.* h.99.

¹⁹ Wahyu dwi mulyono. 2014. Peran Komite Madrasah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan SMK di Kabupaten Lamongan Jawa Timur. *Jurnal pendidikan vokasi*. Vol 4. No.3. h. 6

Komite madrasah memiliki peran sebagai penghubung (*mediator*) antara madrasah dengan orang tua dan masyarakat. Keberadaan Komite Madrasah di lembaga pendidikan swasta akan menjadi tali pengikat antara pihak madrasah, orang tua dan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan akan menjadi kunci keberhasilan upaya peningkatan pendidikan.

Peran komite sebagai *mediator* antara pemerintah dengan masyarakat disatuan pendidikan seperti:

1. Melakukan kerjasama dengan masyarakat baik perorangan, organisasi pemerintah dan kemasyarakatan untuk penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu seperti:
 - a) Membina dan hubungan kerjasama yang harmonis dengan seluruh *stakeholder* pendidikan di sekitar madrasah.
 - b) Mengadakan penjagaan tentang kemungkinan untuk dapat mengadakan kerjasama dengan lembaga lain diluar madrasah untuk memajukan mutu pembelajaran di madrasah.
2. Menampung dan menganalisis aspirasi ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat dalam bentuk:
 - a) Menyebarkan koesioner untuk memperoleh masukan, saran dan ide kreatif dari *stakeholder* pendidikan disekitar madrasah.
 - b) Menyampaikan laporan kepada masyarakat secara tertulis tentang hasil pengamatannya terhadap pengembangan pendidikan di daerah sekitar madrasah.²⁰

Sebagai mediator komite madrasah berfungsi menjadi penghubung madrasah dengan orang tua dan masyarakat. Peran sebagai mediator yang dilakukan komite madrasah dalam pelaksanaan program pendidikan lebih kepada upaya memfasilitasi berbagai masukan dari masyarakat terhadap kebijakan dan program madrasah yang ditetapkan oleh madrasah. Masukan ini

²⁰ *Ibid.* h.7

akan menjadi perhatian bagi pengambilan kebijakan madrasah, yang. Sehingga diharapkan berbagai kebijakan dan program madrasah yang diambil dapat diterima dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.²¹

Peran *mediator* tersebut memiliki tujuan yaitu memberikan informasi tentang tujuan-tujuan, program-program serta kebutuhan-kebutuhan madrasah kepada masyarakat. Disamping itu juga memberikan penerangan kepada madrasah tentang kebutuhan, harapan dan tuntutan masyarakat yang ditujukan kepada madrasah. Dalam perannya sebagai penghubung antara madrasah dan masyarakat terperinci pada program kegiatan komite madrasah. Program tersebut antara lain:

1. Menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan *industry*
2. Menjalin hubungan sinergi antara madrasah dan *stakeholder*
3. Mengadakan sarasehan pendidikan
4. Menyelenggarakan diskusi pendidikan
5. Menerbitkan media komunikasi
6. Pemulihan data.²²

Program kegiatan yang disusun agar lebih konkrit dan dapat terlaksana, maka harus disertai dengan alokasi dana anggaran. Komite madrasah dalam menjalankan perannya sebagai *mediator* dengan kegiatan antara lain: mengidentifikasi aspirasi masyarakat, menampung usulan kebijakan program yang berasal dari wali murid, masyarakat maupun komite madrasah. Komite madrasah sebagai *mediator* membuat perumusan kegiatan mediasi antara

²¹ Sri Renani, dkk, *komite madrasah* (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2008), h. 56-58

²² *Ibid.* h. 60

madrasah dengan pemerintah, elemen masyarakat, wali murid serta dunia industri. Rumusan mediasi tersebut kemudian dibahas bersama madrasah untuk disusun kedalam suatu proposal. Proposal yang diajukan meliputi pengajuan kegiatan, permintaan narasumber kegiatan, pengajuan bantuan sarana dan prasarana dan pengajuan bantuan anggaran untuk pengembangan madrasah.²³

Pelaksanaan peran komite madrasah sebagai penghubung telah membuktikan adanya upaya mendorong tumbuhnya perhatian masyarakat dan membuka akses hubungan masyarakat. Peran komite madrasah sebagai penghubung juga memiliki fungsi dalam mensosialisasikan program madrasah kepada masyarakat. Komite juga berperan memfasilitasi masukan dari masyarakat terhadap kebijakan program pengembangan madrasah. Sebagai penghubung dengan masyarakat, komite juga berperan dalam menampung pengaduan, keluhan dari masyarakat terhadap kinerja madrasah. Masukan yang berasal dari masyarakat kemudian dikomunikasikan kepada madrasah agar memperoleh perhatian yang pada gilirannya menjadi dasar perumusan program kebijakan.²⁴

Peran Komite Madrasah yang ada pada UU No. 20 tahun 2003 pasal 56 mengenai dewan pendidikan dan komite madrasah disebutkan bahwa:

²³ *Ibid.* h.70.

²⁴ *Ibid.* h.73

- a. Masyarakat berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Madrasah/Madrasah.
- b. Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
- c. Komite Madrasah/Madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana pada tingkat satuan pendidikan.²⁵

Untuk fungsi dari komite madrasah, sebenarnya merupakan penjabaran dari peran komite madrasah. Menurut Kepmendiknas No 44/U/2002 fungsi komite madrasah adalah sebagai berikut.

- a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- b. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), pemerintah daerah, dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
- d. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah/DPRD mengenai:
 1. Kebijakan dan program pendidikan.
 2. Kriteria tenaga daerah dalam bidang pendidikan.

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003

3. Kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan.
 4. Kriteria fasilitas pendidikan
 5. Hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan.
- e. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
- f. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- g. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.

Fungsi nyata komite madrasah dalam pengembangan pembelajaran adalah sebagai berikut:

- a. Membantu madrasah mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ini sesuai UU Sisdiknas No. 20/2003 Pasal 36 Ayat 2
- b. Mendorong tumbuhnya perhatian dan dukungan masyarakat terhadap penyelenggaraan pembelajaran yang bermutu.
- c. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/ organisasi/ dunia usaha/ dunia Industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pembelajaran yang bermutu.

- d. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu pembelajaran.
- e. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pembelajaran yang bermutu.
- f. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.²⁶

Bila kita mencermati penjabaran mengenai peran dan fungsi komite madrasah diatas, kita dapat mengetahui bahwa komite madrasah memiliki tugas yang cukup berat berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan di madrasah. Bila upaya pengoptimalan kinerja komite madrasah dapat berjalan dengan baik tentu perbaikan peningkatan mutu pendidikan di madrasah juga akan meningkat.

²⁶ Selvi Mayarani. 2014. Peran Komite Madrasah dalam Pengadaan sarana dan prasarana di SDN Pucang IV Sidoarjo. *Jurnal inspirasi pendidikan*. Vol 4. No 4. h. 169

B. Manajemen Sarana Dan Prasarana

1. Pengertian Manajemen Sarana dan Prasarana

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses kerja sama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Definisi itu menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang ada dimadrasah harus didayagunakan dan dikelola untuk kepentingan proses pembelajaran dimadrasah. Pengelolaan itu dimaksudkan agar dalam menggunakan sarana dan prasarana dimadrasah bisa berjalan dengan *efektif* dan *efisien*. Pengelolaan sarana dan prasarana merupakan kegiatan yang sangat penting dimadrasah, karena keberadaannya akan sangat mendukung terhadap suksesnya proses pembelajaran madrasah.

Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pengajaran menurut suharno. Menurut Depdiknas Prasarana pendidikan yaitu fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya pendidikan atau pengajaran.²⁷

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu faktor pendidikan yang keberadaannya sangat mutlak dalam proses pendidikan. Menurut Ary H.Gunawan bahwa kegiatan administrasi sarana dan prasarana

²⁷ Dr.Matin,M.Pd, *manajemen sarana dan prasarana pendidikan*, (Jakarta: Raja grafindo persada, 2016), h. 26

pendidikan meliputi perencanaan, prakualifikasi, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, pengapusan dan pengendalian.

Menurut Ibrahim Bafadal sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan parobot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di madrasah. Sedangkan prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di madrasah.²⁸

Manurut Mulyasa bahwa sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti: gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat media pembelajaran. Adapaun yang dimaksud prasarana pendidikan dalam proses pembelajaran, seperti: halaman madrasah, kebun madrasah, taan madrasah, dan jalan menuju madrasah. Syahril juga menjelaskan bahwa sarana merupakan unsur yang secara langsung menunjang atau digunakan dalam pelaksanaan suatu kegiatan, dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Unsur tersebut dapat berbentuk: meja, kursi, kapur, papan tulis, alat peraga dan sebagainya.²⁹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang secara langsung

²⁸ Putri Isnaeni. 2013. Manajemen sarana dan prasarana di SMK N 1 Kasihan Bantul. *Jurnal akuntabilitas manajemen pendidikan*. Vol 1. No 1. h. 101

²⁹ Siti khoiriyah, manajemen sarana dan prasarana di SDN 1 Pendowo Asri Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang. (tesis program pascasarjana magister manajemen pendidikan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan universitas lampung, 2016). H. 11

dapat menunjang proses pendidikan, sedangkan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan.

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan diartikan sebagai suatu aktivitas menyeluruh yang dimulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan berbagai macam property pendidikan yang dimiliki oleh suatu institusi pendidikan.

Manurut Ary H. Gunawan manajemen sarana prasarana pendidikan merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan sungguh sungguh serta pembinaan secara bertahap terhadap benda benda pendidikan, agar senantiasa siap pakai (*ready for us*) dalam proses belajar mengajar sehingga PBM semakin efektif dan efisien guna membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Menurut Rohiat manajemen sarana dan prasarana adalah kegiatan yang mengatur untuk mempersiapkan segala peralatan atau material bagi terselenggaranya proses pendidikan di madrasah. Manajemen sarana dan prasarana dibutuhkan untuk membantu kelancaran proses belajar mengajar.³⁰

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan.

³⁰ Putri Isnaeni. *Ibid.*, h. 102

2. Tujuan Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan

Menurut Ibrahim bafedal secara umum tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah memberikan layanan secara professional di bidang sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka terselenggaranya proses pendidikan secara efektif dan efisien. Secara rinci tujuannya sebagai berikut:

1. “Untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui system perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama.
2. Untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana madrasah secara tepat dan efisien.
3. Untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana madrasah, sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai dalam setiap diperlukan oleh semua personil madrasah.”³¹

Selanjutnya, Arum menjelaskan tentang tujuan manajemen sarana dan prasarana yaitu memberikan sistematika kerja dalam mengelola pendidikan berupa fasilitas belajar, sehingga tugas-tugas operasional kependidikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien menuju sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Direktorat Tenaga Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional dalam bukunya sarana dan prasarana pendidikan pematrasahan berbasis madrasah menjelaskan bahwa manajemen sarana dan prasarana diharapkan dapat membantu madrasah dalam merencanakan kebutuhan fasilitas, mengelola

³¹ Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2009), cet ke-1, h. 102

kegiatan investasi sarana dan prasarana, serta kegiatan penghapusan barang inventaris madrasah.³²

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah supaya perencanaan, pengadaan, pemakaian, dan pemeliharaan sarana dan prasarana dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

3. Prinsip Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan

Beberapa prinsip dasar tentang manajemen sarana dan prasarana pendidikan antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Harus mengembangkan cita dan citra masyarakat seperti yang dinyatakan dalam filsafah dan tujuan pendidikan.
- 2) Perencanaan hendaknya merupakan pancaran keinginan bersama dengan pertimbangan.
- 3) Hendaknya disesuaikan bagi kepentingan peserta didik, demi terbentuknya karakter/watak mereka dan dapat melayani serta menjamin mereka diwaktu mengikuti pendidikan sesuai dengan bakatnya masing-masing.
- 4) Perabot, perlengkapan, dan peralatan hendaknya disesuaikan dengan kepentingan pendidikan yang bersumber dan kepentingan serta kegunaan atau manfaat bagi peserta didik dan tenaga kependidikan.

³² *Ibid.* h. 103

- 5) Administrator lembaga pendidikan harus dapat membantu program pembelajaran secara efektif, melatih para tenaga kependidikan serta memilih alat dan cara menggunakan agar mereka dapat menyesuaikan diri serta melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
- 6) Sebagai pertanggung jawab lembaga pendidika, harus mampu menggunakan serta memelihara perabot dan perlengkapan sekitarnya sehingga ia dapat membantu terwujudnya kesehatan, kemampuan dan keindahan serta kemajuan suatu lembaga.
- 7) Sebagai penanggung jawab lembaga pendidikan bukan hanya mengetahui kekayaan yang dipercayakan kepadanya, tetapi juga harus memperhatikan seluruh keperluan alat-alat pendidikan yang dibutuhkan peserta didik, sanggup menata dan memeliharanya.³³

Prinsip lain dalam mengelola sarana dan prasarana pendidikan dimadrasah juga disampaikan oleh bafadal antara lain:

- a) Prinsip pencapaian tujuan, yaitu sarana dan prasarana pendidikan dimadrasah harus dalam kondisi siap pakai apabila akan didayagunakan oleh personil madrasah dalam rangka pencapaian tujuan proses pembelajaran dimadrasah.
- b) Prinsip efisien, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan harus dilakukan melalui perencanaan yang seksama, sehingga dapat diadakan sarana pendidikan yang baik dengan harga yang murah. Demikian juga pemakaiannya harus dengan hati-hati dan akan mengurangi pemborosan.
- c) Prinsip administrative, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan dimadrasah harus memperhatikan undang-undang, peraturan, intruksi, dan petunjuk teknis yang diperlakukan oleh pihak berwenang.

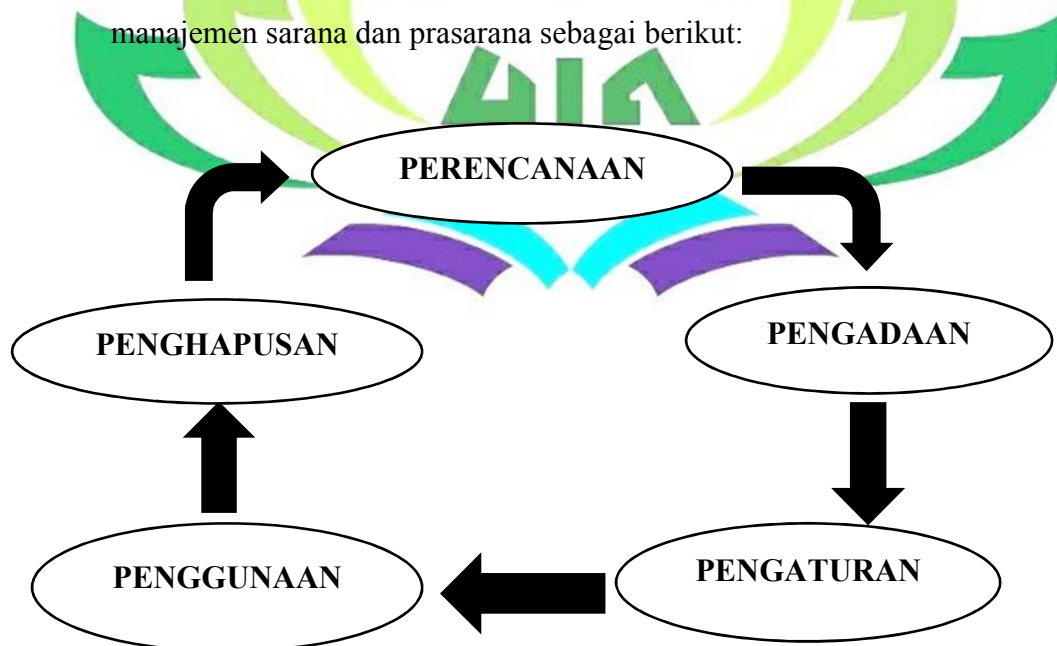
³³ Hikmat, *Manajemen Pendidikan*, (Pustaka Setia, Bandung), 2011. H.54

- d) Prinsip kejelasan tanggung jawab, yaitu manajemen sarana prasarana pendidikan dimadrasah harus dilegasikan kepada personil madrasah yang mampu bertanggung jawab, apabila melibatkan personil madrasah dalam manajemennya, maka perlu adanya deskripsi tugas tanggung jawab yang jelas untuk setiap personil madrasah.
- e) Prinsip kekohesifan, yaitu bahwa manajemen sarana prasarana pendidikan dimadrasah itu harus direalisasikan dalam bentuk proses kerja madrasah yang sangat kompak.³⁴

4. Proses Manajemen Sarana dan Prasarana

Proses yang dilakukan dalam upaya pengadaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, pengaturan, penggunaan, dan penghapusan.³⁵

Kelima proses tersebut dapat dipadukan sehingga membentuk suatu siklus manajemen sarana dan prasarana sebagai berikut:



³⁴ Ibrahim Bafadal, *Manajemen Perlengkapan Madrasah*, (PT. Bumi Aksara, Jakarta), 2004, h.66

³⁵ Barnawi dan M. Ariffin, *Manajemen sarana dan prasarana madrasah*, (Ruzz media, Jogjakarta, 2012), h. 48

a) Perencanaan

Perencanaan berasal dari kata rencana yang memiliki arti rancangan atau kerangka dari suatu yang akan dilakukan pada masa depan. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan proses perancangan upaya pembelian, penyewaan, peminjaman, penukaran, daur ulang, rekondisi/rehabilitasi, distribusi atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan madrasah.³⁶

Proses manajemen sarana dan prasarana diawali dengan perencanaan. Proses perencanaan dilakukan untuk mengetahui sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan. Proses ini hendaknya melibatkan unsur-unsur penting di madrasah, seperti kepala madrasah dan wakilnya, dewan guru, kepala tata usaha, bendahara, dan komite madrasah sebagai badan pengawas madrasah.

Fungsi perencanaan memungkinkan organisasi bisa memperoleh dan mengikat sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan, selain itu fungsi perencanaan antara lain untuk melaksanakan kegiatan yang konsisten dengan berbagai tujuan dan prosedur terpilih serta kemajuan dapat terus diawasi dan diukur, sehingga tindakan korektif dapat diambil bila tingkat kemajuan tidak memuaskan.³⁷

³⁶ *Ibid*, h. 51

³⁷ T. Hani Handoko, *Manajemen edisi 2*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2003), h.8

Mengingat pentingnya proses perencanaan, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Hasyr: 18

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا
 اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.³⁸

Ayat tersebut jika dikaitkan dengan perencanaan, dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan setiap diri kita memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok, maksudnya kita diperintahkan untuk membuat rencana apa yang akan kita lakukan kedepannya. Dalam manajemen sarana dan prasarana, menentukan kebutuhan perlu diadakan terlebih dahulu sebelum memberi dan mengadakan sarana dan prasarana, hal tersebut tidak lain agar peralatan yang dibeli atau diadakan dapat tepat sarasan dan tepat guna.

b) Pengadaan

Pengadaan merupakan serangkaian kegiatan menyediakan berbagai jenis sarana dan prasarana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Kebutuhan sarana dan prasarana dapat berkaitan dengan

³⁸ Almumayyaz Al-qur'an tajwid warna, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), h. 799

jenis dan spesifikasi, jumlah, waktu, tempat dan harga serta sumber yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan fungsi operasional kedua dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan setelah perencanaan. Fungsi ini pada hakikatnya merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan permadrassahan sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan sebelumnya.³⁹

Pengadaan sarana dan prasarana madrasah dilakukan dengan cara:

- 1) Dropping dari pemerintah, ini merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada madrasah dengan prosedur menganalisis kebutuhan dan fungsi sarana dan prasarana, mengklasifikasi sarana yang dibutuhkan, membuat proposal pengadaan kepada pemerintah, jika disetujui maka sarpras akan dikirim ke madrasah yang mengajukan permohonan.
- 2) Membeli yaitu dengan cara pembelian langsung yaitu pembelian yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan.
- 3) Meminta sumbangan dari wali murid, madrasah mengadakan rapat dengan komite dan wali murid untuk sama sama memikirkan

³⁹ Martin dan nurhattati fuad, *Manajemen sarana dan prasarana pendidikan: konsep dan aplikasinya*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2016) h. 23

sarana dan prasarana yang dibutuhkan madrasah guna kelancaran proses belajar mengajar.

- 4) Menyewa, biasanya dilakukan jika sarana dan prasarana yang dibutuhkan tidak sering digunakan.
- 5) Membuat sendiri, biasanya sarana yang dibuat berupa alat-alat peraga sederhana yang digunakan untuk membantu proses kegiatan belajar mengajar.

Madrasah dalam mengadakan sarana dan prasarana pendidikan haruslah mengacu pada keppres No: 80/2003 yang telah disempurnakan dengan permendiknas No. 24/2007. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di madrasah pada umumnya melalui prosedur sebagai berikut:

- 1) Menganalisis kebutuhan dan fungsi sarana dan prasarana.
- 2) Mengklasifikasikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
- 3) Membuat proposal pengadaan sarana dan prasarana yang ditujukan kepada pemerintah bagi madrasah negeri atau pihak yayasan bagi madrasah swasta.
- 4) Bila disetujui maka akan ditinjau dan ditinjau kelayakannya untuk mendapatkan persetujuan dari pihak yang dituju.
- 5) Setelah dikunjungi dan disetujui maka sarana dan prasarana akan dikirim ke madrasah yang mengajukan permohonan pengadaan sarana dan prasarana tersebut.⁴⁰

⁴⁰ *Ibid*, h.89

c) Pengaturan

Setelah proses pengadaan dilakukan, proses manajemen sarana dan prasarana selanjutnya ialah proses pengaturan sarana dan prasarana. Ada tiga kegiatan yang dilakukan dalam pengaturan ini, yaitu inventarisasi, penyimpanan, dan pemeliharaan.

1) Inventarisasi

Inventarisasi merupakan kegiatan mencatat dan menyusun sarana dan prasarana yang ada secara teratur, tertib, dan lengkap berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sarana dan prasarana yang berasal dari pemerintah (milik negara) wajib diadakan inventarisasi. Melalui inventarisasi ini akan dapat diketahui dengan mudah jumlah, jenis barang, kualitas, tahun pembuatan, merek/ukuran, dan harga barang-barang yang ada dimadrasah.

Berikut adalah ayat yang berkaitan dengan inventarisasi atau pencatatan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

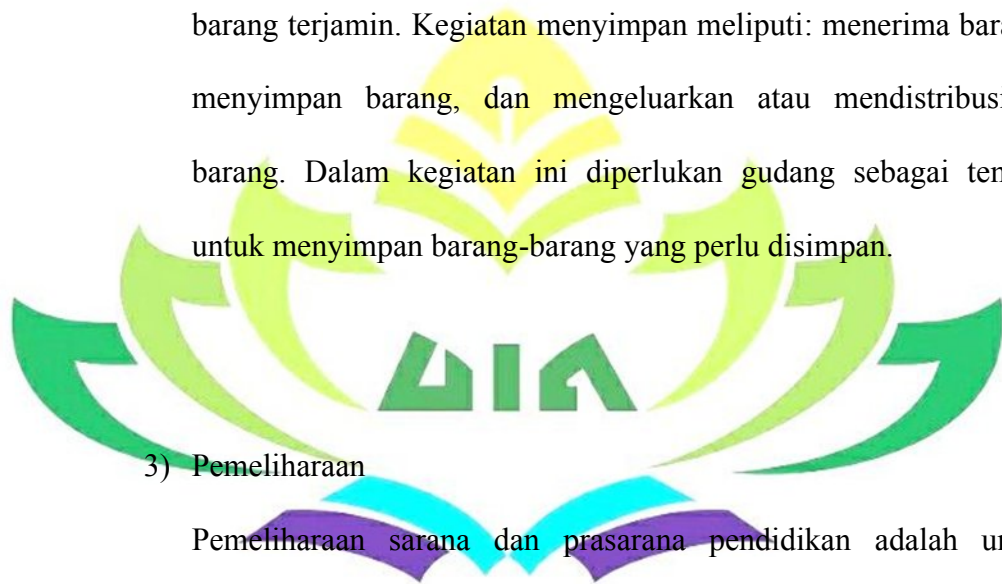
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ.....

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis

diantara kamu menuliskannya dengan benar.... (Q.s Al-baqarah ayat 282)⁴¹

2) Penyimpanan

Penyimpanan adalah kegiatan menyimpan sarana dan prasarana pendidikan di suatu tempat agar kualitas dan kuantitas barang terjamin. Kegiatan menyimpan meliputi: menerima barang, menyimpan barang, dan mengeluarkan atau mendistribusikan barang. Dalam kegiatan ini diperlukan gudang sebagai tempat untuk menyimpan barang-barang yang perlu disimpan.



3) Pemeliharaan

Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan adalah untuk melaksanakan kepengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna mencapai tujuan pendidikan.

d) Penggunaan

Penggunaan dapat dikatakan sebagai kegiatan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung proses pendidikan demi mencapai tujuan pendidikan. Proses penggunaan yaitu

⁴¹ Almumayyaz Al-qur'an tajwid warna, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), h. 59

pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung proses pendidikan.

Ada dua prinsip yang harus diperhatikan dalam pemakaian perlengkapan pendidikan, yaitu prinsip efektivitas dan prinsip efisiensi. Prinsip efektivitas berarti semua pemakaian perlengkapan pendidikan dimadrasah harus ditujukan semata-mata dalam memperlancar pencapaian tujuan pendidikan madrasah. Prinsip efisiensi berarti pemakaian semua perlengkapan pendidikan secara hemat dan hati-hati sehingga semua perlengkapan yang ada tidak mudah habis, rusak dan hilang.⁴²

e) Penghapusan

Penghapusan sarana dan prasarana adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan/menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventarisasi karena sarana dan prasarana sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran di madrasah.⁴³

Barang-barang perlengkapan pendidikan madrasah yang memenuhi syarat penghapusan menurut bafedal adalah barang-barang:

⁴² Depdiknas, *undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional*

⁴³ Barnawi dan M. Ariffin, *Manajemen sarana dan prasarana madrasah*, (Ruzz media, Jogjakarta, 2012), 79

- 1) Dalam keadaan rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi,
- 2) Tidak sesuai dengan kebutuhan,
- 3) Kuno atau barang penggunaannya tidak sesuai lagi,
- 4) Terkena larangan,
- 5) Mengalami penyusutan diluar kekuasaan pengurus barang,
- 6) Yang biaya pemeliharaannya tidak seimbang dengan kegunaannya,
- 7) Barang yang dibeli berlebihan dan tidak dapat digunakan,
- 8) Dicuri,
- 9) Diselewengkan, dan
- 10) Terbakar atau musnah akibat adanya bencana alam.⁴⁴

Jika sarana dan prasarana mengalami hal-hal tersebut maka bisa dilakukan usulan untuk diadakannya penghapusan sarana dan prasarana.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia, langkah-langkah penghapusan barang pendidikan yang ada dimadrasah adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala madrasah mengelompokkan perlengkapan yang akan dihapus dan meletakkannya di tempat yang aman namun tetap dilokasi madrasah
- 2) Menginventarisasikan perlengkapan yang akan dihapus dengan cara mencatat jenis, jumlah, dan tahun pembuatan perlengkapan tersebut
- 3) Kepala madrasah mengajukan usulan penghapusan barang dan pembentukan panitia penghapusan, yang dilampiri dengan data barang yang rusak ke kantor Dinas Pendidikan Nasional Kota/Kabupaten
- 4) Setelah SK penghapusan dari kantor Dinas Pendidikan Nasional Kota/Kabupaten terbit, selanjutnya panitia penghapusan segera bertugas, yaitu memeriksa kembali barang yang rusak berat, biasanya dengan cara membuat berita acara pemeriksaan

⁴⁴ Ibrahim bafadal, *Manajemen perlengkapan madrasah, teori dan aplikasinya*, h.62

- 5) Begitu selesai melakukan pemeriksaan, panitia mengusulkan penghapusan barang-barang yang terdaftar di dalam berita acara pemeriksaan. Dalam rangka itu, biasanya perlu adanya pengantar dari kepala madrasah, usulan itu lalu diteruskan ke kantor pusat jakarta
- 6) Akhirnya begitu surat keputusan penghapusan dari jakarta datang, bisa segera dilakukan penghapusan terhadap barang-barang tersebut. Ada dua kemungkinan penghapusan perlengkapan madrasah, yaitu dimusnahkan dan dilelang. Apabila melalui lelang yang berhak melelang adalah kantor lelang setempat. Sedangkan hasil lelang menjadi milik negara.⁴⁵

C. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelitian sebelumnya dapat dijelaskan melalui skripsi, jurnal, dan tesis sebagai berikut:

Siti khoiriyah (2016) dengan tesis yang berjudul “Manajemen sarana dan prasarana pendidikan di SDN 1 Pendowo Asri Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang”. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mendeskripsikan perencanaan, pengadaan, penggunaan, inventarisasi, penggunaan, pemeliharaan serta penghapusan sarana dan prasaran pendidikan, serta kendala yang dihadapi madrasah dalam manajemen sarana dan prasarana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan study kasus. Sumber data diperoleh dari kepala madrasah sebagai informan kunci, guru, bendahara barang dan komite madrasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) perencanaan sarana dan prasarana dilakukan oleh panitia tiap awal tahun pelajaran, (2) pengadaan sarana dan prasarana dilakukan dengan cara membeli, bantuan, dan membuat sendiri. Sumber dana yang digunakan berasal dari dana

⁴⁵ *Ibid*, h. 63

BOS dan DAK, (3) inventarisasi dilakukan dalam rangka penyempurnaan pengurusan dan pengawasan. Madrasah melakukan kegiatan inventarisasi yang dilaksanakan oleh bendahara barang dan operator DAPODIK, (4) penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana disesuaikan dengan kebutuhan serta mengikuti tata tertib yang telah dibuat, (5) penghapusan sarana dan prasarana dilakukan terhadap sarana dan prasarana yang rusak atau hilang, (6) kendala yang dihadapi madrasah dalam manajemen sarana dan prasarana adalah keterbatasan dana, kompetensi, petugas yang belum memadai serta belum semua guru memiliki kesadaran terhadap pemeliharaan dan penggunaan sarana dan prasarana pendidikan.⁴⁶

Wahyu dwi mulyono (2014) membahas tentang “peran komite madrasah dalam penyelenggaraan pendidikan SMK di Kabupaten Lamongan Jawa Timur”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran komite madrasah dalam penyelenggaraan pendidikan SMK Negeri dan SMK swasta di Lamongan Jawa Timur sebagai badan pertimbangan, badan pendukung, badan pengontrol, dan badan penghubung. Pengumpulan data menggunakan kuwesioner dengan skala likert. Analisis data menggunakan teknik data analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) peran komite madrasah dalam penyelenggaraan pendidikan SMK negeri secara keseluruhan termasuk dalam kategori baik. Peran yang paling tinggi adalah sebagai badan pertimbangan,

⁴⁶ Siti khoiriyah, manajemen sarana dan prasarana di SDN 1 Pendowo Asri Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang. (tesis program pascasarjana magister manajemen pendidikan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan universitas lampung, 2016)

kemudian sebagai badan pendukung, dan sebagai badan penghubung, sedangkan peran yang paling rendah adalah sebagai badan pengontrol. (2) peran komite madrasah dalam penyelenggaraan pendidikan SMK swasta secara keseluruhan termasuk dalam kategori baik. Peran yang paling tinggi adalah sebagai badan pendukung, kemudian sebagai badan penghubung, dan sebagai badan pertimbangan, sedangkan peran yang paling rendah adalah sebagai badan pengontrol.⁴⁷

Siska yuni larasati (2009) dengan skripsi berjudul “peran komite madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMA Ronggolawe di kota Semarang” penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang diperoleh melalui alat pengumpul data yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan beberapa pihak madrasah dapat diketahui bahwa belum atau tidak semua peran komite madrasah dilakukan. Dalam menjalankan tugas dan perannya masih ada kekurangan. Peran komite madrasah sebagai pemberi pertimbangan diwujudkan dalam bentuk pemberian pertimbangan terhadap penyediaan dan penggunaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh madrasah. Komite madrasah juga memberikan pertimbangan terhadap penggunaan dan pemanfaatan anggaran atau dana yang diperoleh madrasah, memberikan masukan tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja madrasah (RAPBS). Peran komite madrasah sebagai

⁴⁷ Wahyu dwi mulyono. 2014. Peran komite madrasah dalam penyelenggaraan pendidikan SMK di kabupaten lamongan Jawa timur. *Jurnal pendidikan vokasi*. Vol 4. No 3

pendukung berupa dukungan materil dan moril. Peran sebagai pengontrol sebagai alokasi anggaran dengan melakukan pengawasan terhadap alokasi anggaran untuk pelaksanaan program madrasah dan melakukan pengawasan terhadap partisipasi madrasah pada program madrasah. Komite madrasah juga berperan serta dalam rangka transparansi penggunaan alokasi dana pendidikan yang berasal dari pusat agar lebih dapat dipertanggung jawabkan. Peran komite sebagai mediator sejauh ini wujudnya berupa penghubung antara kepala madrasah dengan masyarakat, kepala madrasah dengan dewan pendidikan serta kepala madrasah dengan madrasah itu sendiri dalam hal ini guru, staff karyawan dan murid.⁴⁸

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya terdapat aspek-aspek yang membedakan antara penelitian ini:

Penelitian pertama terdapat kendala, kendala dalam penelitian ini adalah madrasah mengalami keterbatasan dana, kompetensi petugas yang belum memadai serta belum semua guru memiliki kesadaran terhadap pemeliharaan dan penggunaan sarana dan prasarana pendidikan.

Penelitian kedua peran komite madrasah dalam penyelenggaraan pendidikan di SMK negeri dan SMK swasta secara keseluruhan dalam kategori baik.

Penelitian ketiga dapat diketahui bahwa pihak madrasah belum atau tidak semua peran komite madrasah dilakukan kemudian menjalankan tugas dan

⁴⁸ Siska Yuni Larasati, peran komite madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMA Ronggolawe kota Semarang, (skripsi program strata 1 pendidikan kewarganegaraan universitas negeri semarang, 2009)

perannya masih ada kekurangan. Se jauh ini peran komite madrasah sebagai mediator berupa penghubung antara kepala madrasah dengan masyarakat, kepala madrasah dengan dewan pendidikan, serta kepala madrasah dengan madrasah itu sendiri dalam hal ini guru, staff karyawan dan murid.

Penelitian yang penulis teliti berbeda dengan skripsi, jurnal, dan tesis diatas penulis meneliti mengenai kontribusi komite madrasah terhadap manajemen sarana dan prasarana di pondok pesantren , penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi komite madrasah terhadap pengadaan manajemen sarana dan prasarana di pondok pesantren, aspek yang mempengaruhi tentang penelitian ini adalah Membeli, Membuat sendiri, Bantuan atau hibah, Menyewa, Meminjam, Mendaur ulang, Menukar, dan Memperbaiki atau merekonstruksi kembali.

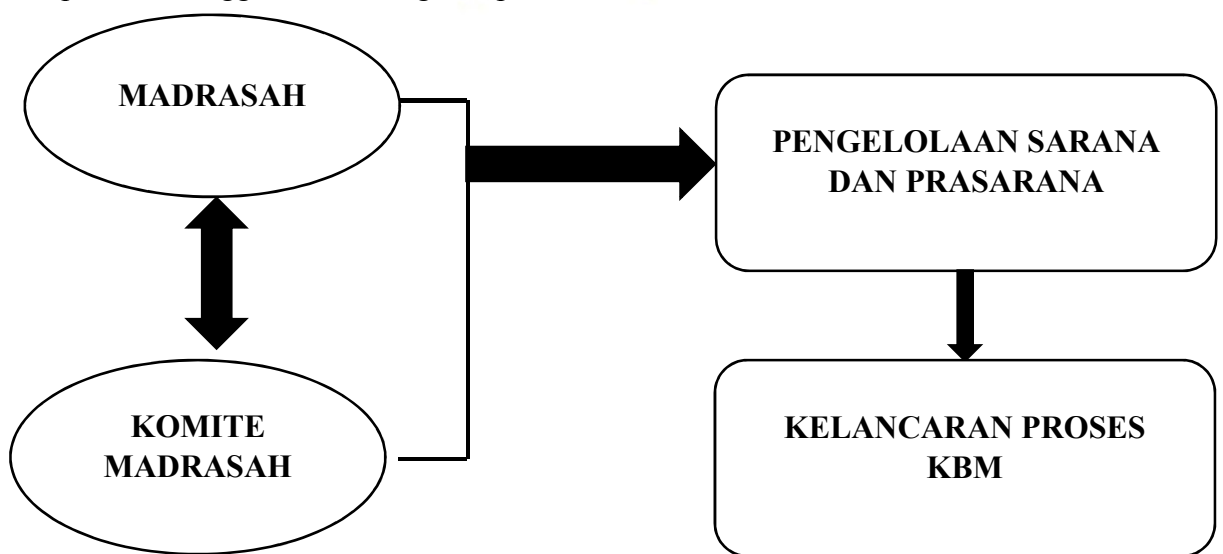
D. Kerangka Berfikir

Dalam dunia pendidikan, salah satu unsur penting yang harus ada agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik yaitu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Pengertian dari sarana pendidikan yaitu segala peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dapat digunakan untuk menunjang proses pendidikan. Sedangkan yang dimaksud dengan prasarana pendidikan yaitu fasilitas yang tidak langsung menunjang proses pendidikan atau pengajaran.

Terkait masalah sarana dan prasarana pendidikan di madrasah, pihak madrasah bekerjasama dengan komite madrasah sebagai badan yang mewadahi

peran serta masyarakat dan orang tua wali murid di madrasah untuk bersama-sama menjaga kelangsungan proses belajar mengajar agar tetap berjalan lancar. Seperti yang sudah diuraikan diatas bahwa tugas komite madrasah yaitu membantu upaya untuk meningkatkan dan menyalurkan kelancaran penyelenggaraan pendidikan di madrasah, baik langsung maupun tidak langsung.

Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa komite madrasah seharusnya memiliki andil yang cukup besar dalam manajemen sarana dan prasarana di madrasah. Pondok Pesantren tahfidz qur'an dewan da'wah lampung masih memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang masih kurang. Untuk itu peneliti akan meneliti sejauh mana peran dari komite madrasah dalam manajemen sarana dan prasarana di Pondok Pesantren tahfidz qur'an dewan da'wah lampung. Untuk menggambarkan lebih jelas terkait judul dan permasalahan yang akan diteliti, peneliti menggambarkan bagan seperti di bawah ini.



Gambar 1.1

Kerangka Berfikir Penelitian

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman A. Ghani, *Metodologi Penelitian Tindakan Sekolah*, Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2014.
- Abu Ziyah, *wawancara ketua sarana dan prasarana pondok pesantren tahfidz qur'an dewan dakwah lampung*, Tanggal 18 november 2019
- Almumayyaz Al-qur'an tajwid warna, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014.
- Arikunto, *Manajemen Pendidikan*, Yogyakarta: Aditya Media, 2009.
- Ary H. Gunawan, *Administrasi Sekolah (Administrasi Pendidikan Mikro)* cetakan 1, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Bafadal, Ibrahim, *manajemen perlengkapan sekolah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Barnawi, *manajemen sarana dan prasarana sekolah*. Jogjakarta: Arruz Media, 2012
- Cholid Nabuko dan Abu Ahmadi, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Darmawan, *Manajemen sarana dan prasarana dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Jurnal pelopor pendidikan*. Vol 6. No 2. Juni 2014.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: Psikologi UGM, 1983.
- Haidar, *Wawancara ketua komite pondok pesantren tahfidz qur'an dewan dakwah lampung*, Tanggal 17 november 2019
- Hasbullah, *otonomi pendidikan: kebijakan otonomi daerah dan implikasinya terhadap penyelenggaraan pendidikan*, Jakarta: Rajawali, 2010.
- Isnaeni, Putri, *Manajemen sarana dan prasarana di SMK N 1 Kasihan Bantul*. Jurnal akuntabilitas manajemen pendidikan. Vol 1. No 1. 2013.
- Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Agama dan Humaniora*, Yogyakarta: Paradigma, 2012.
- Kepmendiknas No.44 tahun 2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah.

- Khaeruddin, dkk. *Kurikulum satuan tingkat pendidikan (KTSP)*, Jogjakarta: Nuansa Aksara, cet, II, 2007.
- Khoiriyah, Siti, *manajemen sarana dan prasarana di SDN 1 Pendowo Asri Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang*. tesis program magister manajemen pendidikan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan universitas lampung, 2016.
- Larasati, Siska Yuni, *peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMA Ronggolawe kota Semarang*. skripsi program strata 1 pendidikan kewarganegaraan universitas negeri semarang, 2009.
- Matin, *manajemen sarana dan prasarana pendidikan*, Jakarta: Rajagrafindo persada, 2016.
- Mayarani, Selvi, Peran Komite Sekolah dalam Pengadaan sarana dan prasarana di SDN Pucang IV Sidoarjo, *Jurnal inspirasi pendidikan*, Vol 4. No 4, 2014
- Mulyono, Wahyu dwi, Peran komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan SMK dikabupaten lamongan Jawa timur, *Jurnal pendidikan vokasi*, Vol 4. No 3, 2014.
- Ningrat, Koentjara, *metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Utama, 1994.
- Sri Renani, dkk, *komite sekolah*, Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2008.
- Sudjana, Nana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah, Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi*, Bandung: Sinar Baru Algensido Offset, 1999.
- Sugiono, *Manajemen Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- _____, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- _____, *Metode Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- _____, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sulistiyorini, Nakik. *Administrasi sarana dan prasarana sekolah dasar*, Malang: Pusat pengembangan guru depdiknas, 2008.
- _____, *Manajemen Pendidikan Islam*, cet ke-1, Yogyakarta: Teras, 2009.

Syaif ummar, *Wawancara pimpinan pondok pesantren tahfidz qur'an dewan dakwah lampung*, Tanggal 17 november 2019

Tim Dosen Adminiatrasi Pendidikan, *Pengelolaan Pendidikan*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2003.

Tim Dosen FIP-IKIP Malang, *pengantar dasar-dasar kependidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: Depdiknas, 2003.

Widyaningsih, Eni, Peran Komite Sekolah dalam pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran di SDN Serayu, *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, Edisi 10. Tahun ke 5, 2016.

Yusuf, Fandhi, Peran Komite Sekolah Dalam Upaya Peningkatan Mutu Pembelajaran di SD Unggulan Aisyiyah Bantul. *Jurnal pendidikan guru sekolah dasar*, Edisi 16 tahun ke IV, 2015.

